

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rumusan masalah, landasan teori, dan pembahasan dalam penelitian mengenai pengaruh tingkat pengangguran terbuka, pendapatan per kapita, dan upah minimum kabupaten/kota terhadap ketimpangan pendapatan di Wilayah Pengembangan Kedungsepur mengarah pada sejumlah temuan utama. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Wilayah Pengembangan Kedungsepur, artinya peningkatan TPT cenderung memperburuk distribusi pendapatan. Meskipun TPT seluruh wilayah menunjukkan kecenderungan menurun, ketimpangan belum sepenuhnya membaik. Kota Semarang dan Kabupaten Kendal yang mencatatkan TPT tertinggi masih menghadapi keterbatasan lapangan kerja dan kesenjangan kompetensi tenaga kerja, sementara Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga menunjukkan bahwa rendahnya TPT tidak otomatis mencerminkan distribusi pendapatan yang merata. Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan menjadi wilayah dengan TPT dan indeks gini terendah karena penyerapan tenaga kerja yang lebih merata antarsektor.
2. Variabel pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Wilayah Pengembangan Kedungsepur, yang berarti peningkatan pendapatan per kapita cenderung diikuti oleh meningkatnya ketimpangan. Kondisi ini terlihat pada daerah dengan pendapatan tinggi seperti Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang,

Kabupaten Kendal yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat namun belum diiringi pemerataan distribusi pendapatan, Kabupaten Demak dengan struktur ekonomi yang lebih merata antarsektor mencatatkan ketimpangan terendah di antara seluruh wilayah Kedungsepur, sedangkan Kabupaten Grobogan meskipun memiliki pendapatan per kapita rendah, ketimpangannya justru tidak menunjukkan perbaikan sepanjang periode pengamatan.

3. Upah minimum kabupaten/kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Wilayah Pengembangan Kedungsepur, artinya kenaikan upah minimum cenderung diikuti oleh meningkatnya ketimpangan. Kondisi ini terjadi karena tingginya upah minimum tidak serta-merta dapat dinikmati oleh seluruh tenaga kerja, terutama di wilayah dengan basis industri dan jasa seperti Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal di mana kesenjangan upah antara pekerja sektor formal dan informal cukup lebar. Kabupaten Demak memiliki struktur ketenagakerjaan yang lebih merata antarsektor sehingga manfaat kenaikan UMK dapat dirasakan lebih luas, sedangkan Kabupaten Grobogan dengan UMK terendah tidak serta-merta mendorong pemerataan distribusi pendapatan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka, pendapatan per kapita, dan upah minimum kabupaten/kota berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Wilayah Pengembangan Kedungsepur. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah guna mengurangi kesenjangan pendapatan serta

mendorong pembangunan ekonomi yang lebih merata dan inklusif. Adapun beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah di Wilayah Pengembangan Kedungsepur perlu merancang kebijakan ketenagakerjaan yang lebih terstruktur dan tepat sasaran. Perhatian khusus perlu diberikan pada angkatan kerja lulusan SMA/ sederajat yang mendominasi pasar tenaga kerja namun belum terserap secara optimal. Hal ini dapat diatasi melalui penyelenggaraan program pelatihan vokasional yang diselaraskan dengan kebutuhan industri lokal, sehingga kompetensi angkatan kerja dapat meningkat dan peluang penyerapannya di sektor formal menjadi lebih besar. Selain itu, penguatan peran UMKM sebagai tulang punggung penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal perlu terus didorong, antara lain melalui kemudahan akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan perluasan jaringan pasar, agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.
2. Strategi pembangunan ekonomi daerah perlu diarahkan tidak semata pada pertumbuhan agregat, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan antarkabupaten/kota. Upaya ini dapat dilakukan melalui pemerataan investasi infrastruktur, penguatan konektivitas antarwilayah, serta perluasan akses kelompok berpendapatan rendah terhadap sumber daya produktif, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berkontribusi langsung terhadap penurunan ketimpangan pendapatan.
3. Kebijakan pengupahan perlu mempertimbangkan tidak hanya besaran nominal yang ditetapkan, tetapi juga efektivitas distribusinya di lapangan. Perlu disadari bahwa penerima upah di suatu wilayah tidak selalu

merupakan penduduk setempat, mengingat mobilitas tenaga kerja antarwilayah yang cukup tinggi menyebabkan sebagian penerima upah adalah pendatang. Kondisi ini berimplikasi pada distribusi manfaat pengupahan yang tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat lokal, sehingga pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kebijakan yang mendorong penyerapan tenaga kerja lokal secara lebih optimal di samping kebijakan penetapan upah minimum itu sendiri.

4. Penelitian ini terbatas pada Wilayah Pengembangan Kedungsepur sehingga temuan yang dihasilkan belum dapat digeneralisasi secara luas. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan kajian dengan menganalisis wilayah pengembangan lain di Jawa Tengah guna mengetahui apakah karakteristik pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan bersifat serupa atau justru menunjukkan pola yang berbeda antarwilayah pengembangan.